

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah tentunya memiliki tujuan (*goals*), rencana (*planning*), dan impian dalam mewujudkan program intansi di masa yang akan datang. Maksud dari tujuan pada pemerintahan ini ialah mendefinsikan keinginan kondisi di masa yang akan datang dapat terwujud. Tujuan merupakan sangat penting dalam mewujudkan atau memenuhi suatu tujuan tertntu yang sudah ditetapkan. Kemudian, Rencana maksud dari rencana ini adalah merencanakan suatu program yang sudah ditentukan dengan menentukan alokasi sumber daya, waktu, tugas, dan tindakan lain yang perlu dilakukan (Richard, 2010). Pemerintahan memiliki titk fokus pada *goals oriented*, maksud dari hal tersebut ialah intansi pemerintahan memiliki target tertentu dalam melaksanakan kegiatan program yang akan dilakukan tahun yang akan mendatang, seperti halnya masa pemerintahan baru di tahun berikutnya. Lima tahun kemudian, sepuluh tahun kemudian atau bisa jadi sampai dua puluh lima tahun yang akan datang.

Good governance merupakan konsep yang pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang efektif. Pemerintahan daerah memiliki penerapan prinsip dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan kualitas layanan publik, mencegah korupsi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pemerintah memiliki komitmen dalam mewujudkan *good governance* dengan adanya hal tersebut maka kinerja yang ada di organisasi pemerintahan dapat perhatian khusus dan dibenahi dengan melakukan sistem pengawasan terhadap pegawai dapat menerpkan fungsi tersendiri dari peran pengawasan pemerintahan. Untuk memberikan keyakinan memadai dlam melakukan kegiatan pengawasan yang sudah dilakukan sesuai dengan indikator yang ditetapkan, pengawasan inter dilakukan dengan dimulai dari proses audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan kegiatan. Dengan hal itu, APIP perlu secara terus menerus melakukan kegiatan transformasi dalam

menjalankan tugasnya agar dapat memberikan nilai tambah bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) dalam penyelenggaraan instansi daerah.

Hal tersebut dapat dikatakan sejalan dengan peran pemerintah serta fungsi dan peran APIP dalam melakukan sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola pada suatu organisasi pemerintah daerah yang sudah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam asosiasi pemerintah Inspektorat, merupakan bagian dalam menjalankan unit kerja utama. Hal ini dapat dilihat dari segi perspektif kapasitas dan kewajiban dalam administrasi pencapaian visi dan misi, serta program-program di pemerintahan terdekat. Dalam kapasitas administrasi esensial yang ada di dalam Inspektorat Teritorial, ia memiliki posisi yang setara dengan pekerjaan pengaturan atau pelaksanaan. Pencapaian visi dan misi serta program pemerintah Inspektorat dapat menjadi kolom yang memiliki tugas melaksanakan pengawasan berdasarkan standar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan terhadap arah penyelenggaraan organisasi dan tata laksana pemerintahan di setiap organisasi pemerintah terdekat di dalam lingkup daerah/kota. APIP mencakup pekerjaan yang besar dalam menghindari pungutan liar yang telah dilakukan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. Selain itu, APIP juga dapat memberikan masukan yang menguntungkan bagi para pemeriksa, pihak luar, pejabat, dan pihak yang berwenang ketika administrasi dan tanggung jawab keuangan daerah di sekitarnya mengalami kemajuan dalam jangka panjang.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan manfaat serta hasil pada pengawasan APIP terutama dari hasil laporan keuangan pemerintah yang dapat mendukung manajemen pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya perbaikan sistem pengendalian internal yang dijadikan rekomendasi oleh BPK. APIP memiliki sifat profesionalitas dan independen dalam meningkatkan transparansi akuntabilitas pengelolaan untuk mendapatkan kewajaran dalam pelaporan keuangan.

Pengawasan dan pemeriksaan memiliki maksud dalam membuat perumusan,

maksud dari hal tersebut merupakan dapat memahami dan memperbaiki dari permasalahan yang akan datang. Hal tersebut sebenarnya sudah sangat lumrah dalam mengawasi. Tujuan dari pengawasan sendiri ialah meningkatkan kinerja aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas umum untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean goverment*).

Adanya tuntutan dan dorongan reformasi serta menjadikan masyarakat semakin kritis membuat teknologi informasi dan rumusan pengawasan yang sederhana tidak cukup lagi. Masyarakat menuntut tidak hanya memperbaiki kesalahan, namun pertanggung jawaban harus diberi kejelasan.

Kesalahan yang dilakukan harus diperbaiki dengan sanksi/disiplin, dan apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana harus dipersiapkan oleh aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan dampak penghalang bagi pelakunya dan orang lain berpikir ribuan kali untuk melakukan perbuatan tersebut. Hal yang sama, sehingga asahnya sikap merendahkan, berkhianat, dan pilih kasih menjadi berkurang dan pada akhirnya lenyap. Biasanya kesempurnaan dan jiwa negara Indonesia yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Penipuan dan Nepotisme (KKN).

Salah satu tuntutan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan meningkatkan peran pendidikan pengawasan daerah. Banyak orang yang merasa bingung dengan kehadiran dan karya para pengajar tersebut, padahal kehinaan semakin merajalela. Keterbukaan didorong oleh perilaku birokrasi yang merosot, yang nampaknya lebih terbuka terhadap tindakan-tindakan mereka yang merosot, bukannya bersikap lebih terbuka. Banyak orang yang menyebut tindakan merendahkan martabat sebagai tindakan salah yang jarang terjadi dan brutal, karena mereka yakin tindakan tersebut akan berdampak buruk bagi generasi mendatang. Tak sedikit pula yang mempertimbangkan pembubaran lembaga pengawas wilayah tersebut, karena dianggap sia-sia dan justru menambah keputusan masyarakat dengan menginvestasikan dana terbuka dalam jumlah besar.

Langkah-langkah proaktif menuju keberhasilan dan pengawasan yang baik dalam memenuhi permintaan tersebut telah dilakukan, seperti menata ulang,

membuat kerangka langkah, membuat peraturan dan sebagainya, namun kondisinya sudah tertangani dan dampaknya belum kritis dan dianggap sebagai didambakan oleh masyarakat. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, diperlukan langkah-langkah bisnis yang lebih rasional dan tepat dalam situasi sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pengawas kewilayahan, mulai dari administrasi hingga pegawai/pihak yang berwenang. Seorang pelopor suatu perkumpulan akan memberi warna pada perkumpulan tersebut, dan ia akan berperan sebagai katalisator dalam perkumpulannya, sehingga untuk itu ia harus mempunyai kecerdikan, kualitas yang mendalam dan kemampuan serta kompetensi yang tinggi dalam menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, tugas pengawasan yang dilakukan merupakan bagian dari pengaturan, dan bukan bagian dari permasalahan.

Di sisi lain, penting untuk membuat dan menyaring dengan mengukur sejauh mana prosedur yang telah dijalankan oleh kantor dalam mencapai visi dan misi. Setuju dengan pembuatnya, diperlukan *Key Execution Pointer* yang berfungsi sebagai alat pengukur. Setiap pengaturan prosedur terus menerus menyertakan tingkat kemenangan. Tanpa tingkat kemenangan, sulit untuk menilai sejauh mana kantor atau orang yang memegang kendali dapat dikatakan efektif. Estimasi efisiensi persiapan bisnis merupakan jawaban atas kebutuhan lembaga yang mendapat kritik dalam pelaksanaannya. Selanjutnya *Key Execution Pointer* (KPI) menjadi alat ukur yang obyektif dalam mensurvei pekerjaan yang terjadi (Arini, 2015).

Key Performance Indicators (KPI) memiliki relevansi yang signifikan dalam membantu Inspektorat mengurangi korupsi melalui beberapa mekanisme utama. Pertama, KPI menyediakan metrik yang obyektif untuk mengukur kinerja Inspektorat. Dengan indikator yang jelas, Inspektorat dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, memantau progres, dan mengambil tindakan yang tepat. Pengukuran yang obyektif ini penting dalam mendeteksi dan mengurangi praktik korupsi, karena memungkinkan penilaian yang transparan dan akurat terhadap kinerja pegawai dan program yang dijalankan. Selain itu, penerapan KPI meningkatkan akuntabilitas dalam organisasi. Pegawai Inspektorat akan lebih bertanggung jawab terhadap tugas dan target yang telah ditetapkan. Ketika KPI

diterapkan, setiap pegawai mengetahui bahwa kinerja mereka akan dievaluasi berdasarkan indikator tertentu, yang mendorong mereka untuk bekerja lebih efisien dan jujur. Akuntabilitas yang tinggi membantu mengurangi peluang terjadinya korupsi karena setiap tindakan dan hasil kerja tercatat dan dievaluasi.

KPI memungkinkan Inspektorat untuk mengevaluasi efektivitas strategi pengawasan yang diterapkan. Dengan memantau indikator kinerja, Inspektorat dapat menilai apakah metode pengawasan dan audit yang digunakan berhasil dalam mengurangi korupsi. Jika ditemukan bahwa metode tertentu tidak efektif, Inspektorat dapat segera melakukan penyesuaian dan memperbaiki pendekatan mereka. Hal ini memastikan bahwa upaya pengawasan selalu relevan dan efisien. Penerapan KPI juga memotivasi pegawai Inspektorat untuk terus memperbaiki kinerja mereka. Dengan adanya target yang harus dicapai dan indikator yang harus dipenuhi, pegawai akan terdorong untuk bekerja lebih baik dan mencari cara-cara inovatif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Semangat untuk perbaikan berkelanjutan ini dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari korupsi. KPI menyediakan data yang konkret untuk menilai kinerja Inspektorat. Penilaian berbasis data ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan fakta. Data yang dihasilkan dari pengukuran KPI dapat digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan anti-korupsi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Secara keseluruhan, KPI memiliki relevansi yang kuat dalam upaya Inspektorat untuk mengurangi korupsi. Dengan mengukur kinerja secara objektif, meningkatkan akuntabilitas, mendorong transparansi, mengidentifikasi risiko, meningkatkan efektivitas pengawasan, memotivasi perbaikan berkelanjutan, dan menyediakan penilaian berbasis data, KPI dapat membantu Inspektorat dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Implementasi KPI yang efektif di Inspektorat Kendal dapat menjadi langkah penting dalam mencegah dan mengurangi korupsi di tingkat pemerintahan desa dan daerah.

Di Kabupaten Kendal, Inspektorat Kendal memiliki peran strategis dalam mengawasi kinerja pemerintahan dan memastikan penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Inspektorat ini bertugas melakukan audit, pengawasan, dan evaluasi

terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah. Namun, maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala desa di Kendal menunjukkan adanya tantangan serius dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

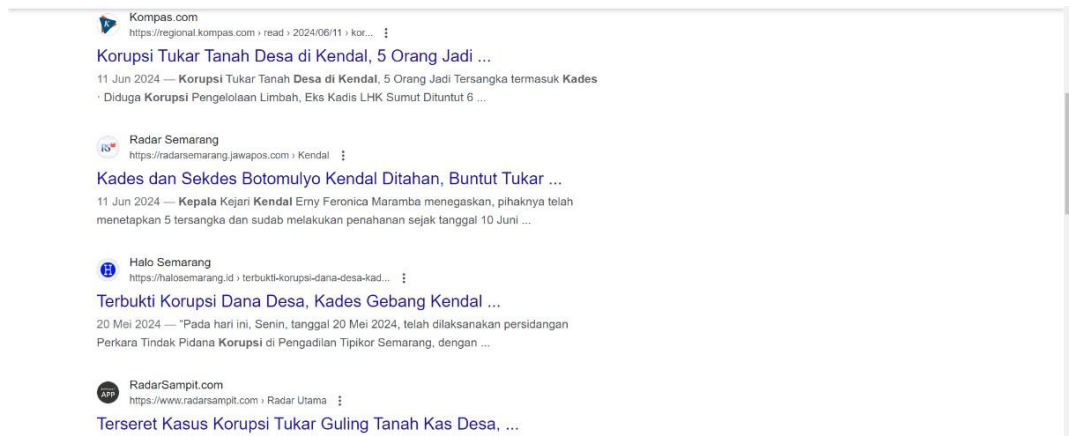
Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Kendal menghadapi sejumlah kasus korupsi yang melibatkan aparatur desa. Salah satu kasus yang mencuat adalah tukar guling tanah di Desa Botomulyo pada tahun 2024, yang melibatkan lima orang, termasuk Kepala Desa Botomulyo (SI), Sekretaris Desa (AR), dan Kasi Pemerintah Kecamatan Cepiring (CS). Kasus ini diduga merugikan negara hingga Rp4,8 miliar. Selain itu, pada tahun 2021, Kepala Desa Gebang, Nur Kholis, divonis satu tahun penjara dan denda Rp50 juta akibat penyalahgunaan Dana Desa sebesar Rp245,8 juta. Tidak hanya itu, pada tahun 2023, muncul dugaan penyelewengan dana desa di Desa Margosari terkait proyek betonisasi yang dilaporkan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa ke Polres Kendal. Kasus-kasus tersebut menunjukkan tantangan besar dalam pengawasan dan tata kelola pemerintahan desa, sekaligus menyoroti pentingnya peran Inspektorat Kabupaten Kendal dalam mencegah praktik-praktik koruptif melalui penerapan indikator kinerja yang lebih efektif dan transparan.

Korupsi di Tingkat desa merupakan masalah yang sering terjadi dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Salah satu faktor utama yang menyebabkan maraknya korupsi di desa adalah kurangnya pengawasan yang memadai. Pengawasan yang lemah membuka peluang bagi aparatur desa untuk menyalahgunakan wewenang mereka tanpa takut akan konsekuensi. Hal ini diperparah oleh budaya korupsi yang sudah mengakar kuat di banyak daerah, di mana norma sosial dan budaya lokal seringkali toleran terhadap praktik-praktik koruptif. Di lingkungan seperti ini, tindakan korupsi bukan hanya diterima secara pasif, tetapi kadang-kadang dianggap sebagai cara yang wajar untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok.

Selain itu, kelemahan sistem hukum juga berkontribusi besar terhadap tingginya angka korupsi di tingkat desa. Penegakan hukum yang lemah dan tidak

konsisten seringkali membuat pelaku korupsi merasa aman dari tindakan hukum. Mereka yakin bahwa meskipun tindakan mereka terungkap, kemungkinan besar mereka akan lolos dari hukuman atau mendapatkan hukuman yang ringan. Kurangnya sanksi yang tegas dan kepastian hukum menurunkan efek jera yang seharusnya ditimbulkan oleh hukum, sehingga korupsi terus berlanjut tanpa ada hambatan berarti.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dan administrasi desa. Akses publik terhadap informasi terkait penggunaan dana desa dan keputusan administratif sering kali sangat terbatas. Ketidadaan transparansi ini menciptakan lingkungan yang ideal untuk korupsi, karena masyarakat tidak memiliki alat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa. Kurangnya transparansi menghambat akuntabilitas, sehingga keputusan-keputusan yang diambil oleh aparatur desa tidak bisa diawasi dan dipertanyakan oleh masyarakat. Kombinasi dari kurangnya pengawasan, budaya korupsi yang toleran, kelemahan sistem hukum, dan minimnya transparansi menciptakan kondisi yang sangat mendukung bagi korupsi untuk berkembang di tingkat desa, merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan lokal.



Gambar 1. 1 Bukti Korupsi Kepala Desa di Kendal Akhir-akhir ini

Gambar di atas jelas menunjukkan bahwa akhir-akhir ini jelas terjadi penyelewengan dana di beberapa Desa di Kendal yang tercantum di banyak kanal berita.

Instansi Pemerintahan memerlukan komitmen disertai dengan pengawasan dan pengelolaan mutu kualitas sumber daya manusianya. Hal itu dapat dibuktikan

melalui peranan lembaga yang mempunyai wewenang untuk pengawasan yaitu Inspektorat yang memiliki tugas untuk menyukseskan dan meminimalisir adanya korupsi dan pengawasan yang akuntabel.

Inspektorat memiliki peran penting sebagai lembaga pengawas internal yang bertugas memastikan tata kelola pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan desa, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam konteks desa, Inspektorat bertanggung jawab untuk memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dana desa, pelaksanaan program pembangunan, serta kepatuhan kepala desa dan perangkatnya terhadap regulasi yang berlaku.

Hubungan Inspektorat dengan desa tidak hanya sebatas pengawasan formal, tetapi juga mencakup fungsi pembinaan. Inspektorat berperan sebagai mitra strategis bagi kepala desa dalam meningkatkan kapasitas tata kelola keuangan dan administrasi. Melalui audit, monitoring, dan pembinaan berbasis *Key Performance Indicators* (KPI), Inspektorat membantu desa mendeteksi potensi penyimpangan lebih awal dan memberikan rekomendasi perbaikan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Namun, hubungan ini juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan pemahaman kepala desa terhadap prinsip *good governance* dan minimnya sumber daya di tingkat desa untuk memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan. Oleh karena itu, sinergi antara Inspektorat dan desa harus terus ditingkatkan melalui pelatihan, pendampingan, dan pengawasan berkelanjutan.

Hipotesis peneliti mengenai dampak yang ditimbulkan dengan adanya kasus-kasus yang telah terjadi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Kendal mempengaruhi tingkat kepercayaan Masyarakat setempat. Pada kesempatan ini peneliti akan membahas mengenai manajemen sumber daya dengan *Key Performance Indicator* untuk mengukur efektivitas dan peranan Inspektorat dalam mengatasi kasus Korupsi yang akhir-akhir ini marak terjadi. Karena, tingkat kepercayaan adalah modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat guna menjalankan kehidupan yang tertib demi kenyamanan dan keamanan kemaslahatan bersama.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi KPI di Inspektorat Kendal?
2. Bagaimana efektivitas KPI dalam mewujudkan *good governance*?
3. Apa pengaruh KPI terhadap pencegahan korupsi desa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi KPI di Inspektorat Kendal.
2. Mengevaluasi efektivitas KPI dalam mewujudkan *good governance*.
3. Mengkaji pengaruh KPI terhadap pencegahan korupsi kepala desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian yang diperoleh dari hasil tinjauan, jenis kegunaan penelitian dikategorikan menjadi dua bagian yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan positif dan berguna untuk kepentingan negara dan keamanan masyarakat kedepannya, disamping itu dapat berguna sebagai ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat mengenai keterlibatan sebagai objek dalam sasaran kebijakan pemerintah, serta penelitian ini diharapkan mampu melengkapi penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini terdapat empat bagian, yaitu:

1. Pemerintah

Penelitian ini dapat mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan apakah berjalan efektif atau tidak, dengan sebelumnya banyaknya kasus korupsi dan banyaknya instansi yang tidak maksimal karena SDM yang tidak berkapabilitas dalam organnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menyumbang mengenai evaluasi performance indicator untuk membuat implementasi parameter indicator kesuksesan pada sistem pemerintahan di Indonesia.

2. Mahasiswa

Studi ini dapat menjadi peluang belajar dan mengevaluasi bagi mahasiswa dengan tujuan untuk meningkatkan performa dan evaluasi system pemerintahan bahwa itu adalah suatu hal yang penting untuk diluruskan.

3. Dosen

Kajian ini juga memberikan keuntungan bagi dosen, terutama menyajikan indikator dan parameter keberhasilan dalam melaksanakan suatu program baik itu berkala/periodic. Yang tentunya dapat bermanfaat sebagai daya ukur sumber daya manusia yang diperlukan dosen sebagai pengajar di kampus sehingga dapat memenuhi target dengan maksimal.

4. Peneliti yang berbeda

Studi-studi ini dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti-penelitian lainnya yang memiliki fokus implementasi *Key Performance Indicator* di perguruan tinggi atau melihat studi kasus yang terjadi di instansi pemerintah.

1.5 Peneliti Terdahulu

Korupsi di tingkat pemerintahan desa merupakan masalah serius yang membutuhkan penanganan efektif melalui kebijakan dan mekanisme pengawasan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah *Key Performance Indicator* (KPI) oleh Inspektorat daerah. Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap penelitian terdahulu, peneliti menemukan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan apa yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini, sebagai berikut: Dalam penelitian yang berjudul “FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT Wilayah Dalam Pelaksanaan Instruksi BEBAS Di KABUPATEN GOWA” tahun 2019, fenomena yang terjadi di Pemerintahan Gowa dimana pengaturan pemerintah daerah tentang pengajaran gratis dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik, dimana pembayaran biaya sekolah gratis tidak mengkoordinasikan satu sekolah dengan sekolah lainnya. Sebagaimana

digambarkan di atas, peran inspektorat sangat diperlukan, khususnya dalam mengawasi penggunaan pendidikan gratis yang menyebabkan banyak kendala dalam pendistribusian cadangan. Oleh karena itu, untuk terlaksananya program pemerintah tentang kebebasan belajar di Pemerintahan Gowa, peran inspektorat lebih dipusatkan pada pengawasan terhadap instansi-instansi penting.

Selain itu, ada penelitian yang berjudul “Kelangsungan Tugas dan Kapasitas (TUPOKSI) SEKRETARIAT Perwakilan INSPEKTORAT Wilayah SULAWESI SELATAN”, pada tahun 2018. Secara umum, kinerja perwakilan pemerintah saat ini masih kurang. Hasil kerja para wakil pemerintah saat ini tidak memberikan hasil yang ideal dalam kehidupan masyarakat atau dalam upaya mencapai tujuan lembaga atau dapat dikatakan tidak dapat diterima apabila ada pekerja yang tidak melaksanakan tugasnya. memenuhi kewajibannya sebagai perwakilan. Adanya perwakilan yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai pegawai pemerintah dengan baik, pola kerja pekerja yang tidak merata, pengajaran pekerja yang tidak baik dan pengaturan perwakilan yang tidak sesuai dengan kapasitas dan keahliannya, mencerminkan perlunya kejelasan gambaran kerja dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai. perwakilan dan telah mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik internal pemerintahan maupun dari kalangan terbuka melalui berbagai lembaga swadaya masyarakat. Dalam artikel yang dikutip oleh Muhammad Kasman, SE, Staf Sub Bagian Administrasi dan umum pada inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan pada website Inspektoratsulsel.id/peran-atasan-dalam-penegakan-disiplin-pns/.

Penelitian yang berikutnya yaitu berjudul “PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN INSPEKTORAT KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI KABUPATEN JENEPONTO” pada tahun 2022 yang diberikan kesimpulan WDP dapat menimbulkan kerugian. Pemeriksaan Keuangan di Kabupaten Jeneponto' pada tahun 2022, diberikan kesimpulan WDP oleh BPK dapat menimbulkan kemalangan. Yakni, pemerintah daerah yang tidak mendapatkan kesimpulan WTP tidak akan mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan (PMK) tentang Pemberian Cadangan Dana Insentif Daerah, padahal tugas Inspektorat secara

normatif adalah melakukan pengawasan dan penjaminan mutu¹¹ terhadap hasil pemeriksaan auditor luar. Namun demikian, dalam perjalanan waktu yang cukup lama, bagian ini belum terlaksana secara ideal dengan adanya penemuan-penemuan dari pemeriksa luar. Dua hal di atas tentu tidak sejalan dengan tujuan pemerintah Kabupaten Jeneponto yang menargetkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Penelitian terdahulu yang selanjutnya berjudul “PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGAWASAN TOKO KOTA DI WILAYAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2018” pada tahun 2022, dalam hal ini Inspektorat Daerah lemah dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Pemerintah Kota, khususnya dalam pengawasan terhadap Penunjang Kota. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes tidak berfungsi sebagai lembaga pengawas penggunaan keuangan daerah. Kasus-kasus penyalahgunaan dan penyelewengan Dana Desa yang terjadi di Kabupaten Brebes dapat menjadi gambaran bahwa pemerintah kota masih belum transparan dan bertanggung jawab dalam penggunaan Keuangan Kota, selain itu perangkat pengawasan yang bertugas mengawasi penggunaan dana kota masih terlihat belum ideal dalam melakukan pengawasan. Dari awal tahun berjalannya Keuangan Kota, kasus-kasus penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran Bantuan Kota terus menerus ditemukan. Dengan demikian, pengarah dan pengawasan yang lebih serius terhadap penggunaan Keuangan Kota sangat penting untuk dilakukan agar pemerintah kota dapat lebih memahami kerangka kerja dan pengaturan yang berlaku dalam penggunaan Bantuan Kota. Selain itu, untuk menjaga jarak strategis dari inkonsistensi dan penyalahgunaan anggaran Bantuan Kota agar tujuan pemerintah kota dalam memanfaatkan Bantuan Kota sebagai perbaikan dan penguatan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Penelitian yang terakhir berjudul “IMPLEMENTASI PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PENGELOLAAN DANA BOS PADA SEKOLAH DASAR (SD) DAN SMU (SMP) PERTAMA DI KOTA PALEMBANG” pada tahun 2022. Dengan jumlah auditor hanya 52 orang, pengawasan yang dilakukan kurang optimal. Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Inspektorat Kota

Palembang menyampaikan, idealnya jumlah auditor yang harus dimiliki Inspektorat untuk melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan SKPD dan pengelolaan dana BOS adalah sebanyak 80 auditor. Pengelolaan dana BOS sebanyak 80 auditor. Jumlah ini dapat berubah sesuai dengan beban kerja dan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang ada. Selain itu, dari wawancara dengan ketua tim pengawasan dana BOS, Inspektorat Kota Palembang belum menyediakan fasilitas berupa aplikasi untuk memudahkan sekolah dalam menginput data. Data yang diterima Inspektorat selama ini berupa data fisik yang selalu dikumpulkan oleh pihak eksternal sebelum waktunya. Hal ini menyebabkan pendataan tidak terorganisir dengan baik dan proses pengelolaan data oleh Inspektorat melebihi batas waktu yang telah ditentukan serta kinerja Inspektorat menjadi tidak efisien.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori *Good governance*

Good governance adalah administrasi yang baik yang telah dicirikan oleh berbagai pendidikan yang berbeda yang dirasakan oleh dunia. Salah satunya, United Nations Development Program (UNDP) dalam sebuah arsip pendekatan yang berjudul “Governance for maintainable human development” (1997) mencirikan *good governance* sebagai sebuah hubungan yang sinergis dan bernilai antara negara, divisi swasta dan masyarakat (Dwiyanto, 2005: 82).

Dengan demikian, tujuan *good governance* yang baik dapat dicapai dalam sebuah negara jika dilihat dari masyarakatnya yang makmur dan sejahtera. Untuk menerapkan administrasi yang baik bukanlah hal yang mudah, karena ada banyak penghalang yang menghantam sebuah negara untuk dapat mengetahui administrasi yang baik seperti korupsi, kolusi, dan pilih kasih yang dilakukan oleh orang-orang dalam negara itu sendiri yang membuat sebuah permainan yang dibuat untuk menguntungkan dan mengatur antarmuka yang mereka miliki. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan administrasi yang baik, pemerintah dan masyarakat sendiri harus bekerja sama untuk mengetahuinya dan menanamkan administrasi yang baik.

Harus bekerja sama untuk sadar dan menanamkan rasa kepedulian terhadap bangsa dalam mengatur administrasi yang baik untuk terus menerus mematuhi aturan atau pedoman yang telah ditetapkan.

1.6.2 Teori MSDM

Manajemen sumber daya manusia merupakan dapat menjadi ilmu atau cara bagaimana mengawasi hubungan dan bagian dari aset (pekerjaan) yang diklaim oleh orang-orang secara efektif dan layak dan dapat dimanfaatkan secara ideal sehingga tujuan perusahaan, perwakilan, dan masyarakat diperluas. MSDM didasarkan pada konsep bahwa setiap pekerja adalah manusia, bukan mesin dan bukan hanya aset perdagangan. Manajemen sumber daya manusia (MSDM) dapat menjadi metode atau strategi yang berkaitan dengan manajemen dan pendayagunaan tenaga kerja (SDM) sekolah/madrasah atau organisasi, baik tenaga edukatif maupun tenaga administratif dengan baik dan cakap, sangat tergantung pada kapasitas kepala sekolah/madrasah baik sebagai pengawas maupun sebagai pelopor di lembaga pendidikan tersebut. Alasan manajemen sumber daya manusia adalah untuk memajukan komitmen yang bermanfaat dari individu atau tenaga kerja kepada asosiasi atau perusahaan dengan cara yang disengaja, bertanggung jawab secara moral dan sosial. Para supervisor dan kantor aset manusia mencapai tujuan mereka dengan memenuhi target mereka.

Menurut Soekidjo Notoatmodjo, tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah untuk memperluas komitmen sumber daya manusia (pekerja) kepada organisasi dalam rangka mencapai efisiensi organisasi yang bersangkutan. Dapat dipahami bahwa semua pelaksanaan otoritatif dalam mencapai misi dan tujuannya tergantung pada individu yang mengawasi asosiasi. Oleh karena itu, aset-aset ini harus diawasi sedemikian rupa sehingga efektif dan layak dalam mencapai misi dan tujuan asosiasi. Target sumber daya manusia tidak hanya mencerminkan kehendak manajemen senior, tetapi juga harus menyeimbangkan tantangan asosiasi, pekerjaan aset manusia dan individu yang dipengaruhi. Kegagalan dalam

melakukan hal tersebut dapat melemahkan kinerja, kelangsungan hidup, dan laba.

1.6.3 Teori *Key Performance Indicator* (KPI)

Key Performance Indicator (KPI) artinya alat bantu dalam instrument sehingga tindakan dapat diambil setelahnya, dikontrol (jika menyimpang, dapat dikenali untuk penyesuaian), dan dijamin untuk mewujudkan hasil kinerja yang diperlukan. Salah satu cara untuk mewujudkan indikator yang baik dalam penilaian kinerja yang representatif adalah dengan memanfaatkan strategi KPI. KPI membandingkan apa yang telah dibuat dengan apa yang telah ditetapkan. Penggunaan yang efektif akan tergantung pada pelaksanaan prosedur pemeliharaan yang baik dalam memahami apa yang telah diputuskan (Ramadian, 2012). *Key Performance Indicator* (KPI) dapat berupa susunan penanda kunci yang dapat diukur dan memberikan data mengenai sejauh mana tujuan utama yang dibebankan pada sebuah asosiasi telah dicapai secara efektif. Komponen-komponen yang terdapat dalam KPI terdiri dari tujuan utama, penanda utama yang penting bagi tujuan utama tersebut, target yang menjadi tolok ukur, dan kerangka waktu atau periode dimana KPI tersebut penting (Soemohadiwidjojo, 2015). KPI harus dipilih secara hati-hati untuk mencerminkan petunjuk pelaksanaan yang sangat penting bagi asosiasi dalam memahami teknik perusahaan dan variabel kemenangan utama organisasi. Penentuan KPI dan target yang akan dicapai tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, tetapi harus dipilih dan diputuskan dengan menggunakan strategi yang pas dan tepat. Pemilihan KPI dan penetapan target KPI yang tepat akan membuat organisasi dapat mengenali potensi kemajuan atau peningkatan eksekusi sehingga KPI secara teratur dikaitkan dengan aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan kinerja (Soemohadiwidjojo, 2015). Sebagai salah satu alat utama manajemen dalam menentukan tujuan utama penentuan KPI adalah (Soemohadiwidjojo, 2015):

1. Menghubungkan visi-misi-nilai, prosedur, dan tujuan pelaksanaan

organisasi dengan pelaksanaan organisasi untuk mencapai tujuan pelaksanaan yang dibutuhkan.

2. Untuk menilai penyimpangan pelaksanaan asosiasi dan/atau divisi apakah ada peningkatan atau penurunan yang patut dicatat.
3. Untuk membandingkan pelaksanaan organisasi saat ini dengan pelaksanaan otentik organisasi, atau membandingkan dengan pelaksanaan asosiasi lain sehingga asosiasi mendapatkan garis besar kekuatan atau kekurangan organisasi dibandingkan dengan pesaing, serta mengetahui celah untuk membentuk penghargaan yang disertakan.
4. KPI otoritatif digunakan sebagai dasar pemikiran untuk menetapkan KPI divisi dan orang atau target kerja.
5. Pencapaian KPI menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan hasil sehingga KPI juga bermanfaat untuk memberdayakan inspirasi untuk bekerja dan perilaku yang baik dari para pekerja.

1.6.4 Teori peran Inspektorat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Perangkat Daerah merupakan mitra kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Organisasi Pengawas Kewilayahan yang disebut Inspektorat Umum, Inspektorat Wilayah, dan Inspektorat Kota merupakan komponen pengawasan kewilayahan yang digerakkan oleh Pemeriksa yang dalam pelaksanaan pengawasannya secara khusus dapat memberikan bantuan kepada Anggota, Pejabat, dan Pimpinan.

Organisasi yang mengawasi pelaksanaan pemerintahan lingkungan adalah inspektorat daerah. Inspektorat daerah memiliki tugas untuk melaksanakan latihan pengawasan di dalam pemerintahan daerah serta kewajiban pengawasan lainnya yang diberikan oleh kepala teritorial kepada inspektorat teritorial. Pelaksanaan pengawasan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah kepada inspektorat daerah. Pelaksanaan pengawasan ini tersebut berupa audit baik audit keuangan maupun audit administrasi. Dalam

melaksanakan pemeriksaan di pemerintah daerah yang dilakukan oleh inspektorat daerah yaitu audit internal.

Inspektorat yang diberikan tugas dan tanggungjawab oleh kepala daerah melakukan tugas dan fungsi pengawasan sebelum BPK melakukan pengawasan sebagai pengawas eksternal pemerintah. APIP inspektorat memiliki peran *watchdog* pada pelaksanaan pengawasan pemerintah. Namun, APIP juga berperan sebagai Konsultan bagi objek pemeriksaan yang Dimana inspektorat akan lebih banyak melakukan pengawasan yang bersifat pencegahan dan berperan sebagai pendamping untuk mencapai pemerintahan yang baik. Peran APIP yang berkompeten dan auditor yang professional dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan dapat menghasilkan audit yang berkualitas.

Auditor internal memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan internal yang merupakan auditor melakukan penilaian secara independent kepada suatu organisasi pemerintah untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan tersebut. Selain itu, inspektorat daerah sebagai aparat pengawas auditor internal dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan dalam peningkatan kinerja organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien.

Tugas dan fungsi inspektorat diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kelola Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten Kota. Pada Permendagri tersebut dinyatakan bahwa Inspektorat melaksanakan tugas pengawasan pada pemerintah, Tugas dan fungsi tersebut yaitu:

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

Pengawasan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemerintahan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Pada pelaksanaan pengawasan serta pembinaan inspektorat masih menemui berbagai hambatan untuk melaksanakan tugas dengan baik, hambatan tersebut yaitu sumber daya

manusia yang dinilai masih kurang mendapat dukungan, dana yang dimiliki terbatas serta pengendalian internal dari suatu organisasi pemerintah masih lemah.

Faktor utama yang dapat meningkatkan presentasi keberhasilan pada pengawasan adalah efektivitas dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara baik dan efisien. Oleh karena itu, APIP dapat melakukan penyesuaian dalam menjalankan proses pemeriksaan untuk dapat mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien

1.6.5 Korupsi di Tingkat Desa

Korupsi di Tingkat desa merupakan masalah yang sering terjadi dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Salah satu faktor utama yang menyebabkan maraknya korupsi di desa adalah kurangnya pengawasan yang memadai. Pengawasan yang lemah membuka peluang bagi aparatur desa untuk menyalahgunakan wewenang mereka tanpa takut akan konsekuensi. Hal ini diperparah oleh budaya korupsi yang sudah mengakar kuat di banyak daerah, di mana norma sosial dan budaya lokal seringkali toleran terhadap praktik-praktik koruptif. Di lingkungan seperti ini, tindakan korupsi bukan hanya diterima secara pasif, tetapi kadang-kadang dianggap sebagai cara yang wajar untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok.

Selain itu, kelemahan sistem hukum juga berkontribusi besar terhadap tingginya angka korupsi di tingkat desa. Penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten seringkali membuat pelaku korupsi merasa aman dari tindakan hukum. Mereka yakin bahwa meskipun tindakan mereka terungkap, kemungkinan besar mereka akan lolos dari hukuman atau mendapatkan hukuman yang ringan. Kurangnya sanksi yang tegas dan kepastian hukum menurunkan efek jera yang seharusnya ditimbulkan oleh hukum, sehingga korupsi terus berlanjut tanpa ada hambatan berarti.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya transparansi

dalam pengelolaan keuangan dan administrasi desa. Akses publik terhadap informasi terkait penggunaan dana desa dan keputusan administratif sering kali sangat terbatas. Ketiadaan transparansi ini menciptakan lingkungan yang ideal untuk korupsi, karena masyarakat tidak memiliki alat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa. Kurangnya transparansi menghambat akuntabilitas, sehingga keputusan-keputusan yang diambil oleh aparatur desa tidak bisa diawasi dan dipertanyakan oleh masyarakat. Kombinasi dari kurangnya pengawasan, budaya korupsi yang toleran, kelemahan sistem hukum, dan minimnya transparansi menciptakan kondisi yang sangat mendukung bagi korupsi untuk berkembang di tingkat desa, merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan lokal.

1.7 Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata "hipo" (hypo) dan "tesis" (thesis) Dengan demikian, hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pendapat atau kesimpulan yang bersifat sementara. Dalam konteks penelitian, hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan jawaban terhadap masalah yang diajukan. Hipotesis ini muncul sebagai dugaan yang cermat dari peneliti atau sebagai hasil penurunan dari teori yang sudah ada. Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan hipotesis asosiatif, yang meneliti adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Ada Implementasi *Key Performance Indicator* sebagai fungsi alat manajemen sumber daya manusia sebagai variable bebas (x) dan masih rendahnya system manajerial dari Inspektorat sehingga masih banyak korupsi di Tingkat Desa sebagai variable terikat (Y). Dari variable yang ada dan juga teori yang telah dipaparkan penulis berhipotesis bahwa adanya hubungan signifikan antara peran implementasi *Key Performance Indicator* sebagai fungsi alat manajemen sumber daya manusia terhadap efektivitas kinerja inspektorat guna berdampak pada kasus Tingkat korupsi di desa Kabupaten Kendal.

1.8 Operasional Konsep

Konsep merupakan gambaran dalam suatu keadaan yang dijadikan pusat

perhatian oleh ilmu sosial. Hal tersebut dapat dikatakan dengan memudahkan pemahaman masyarakat dalam suatu topik. Topik ini dapat dibahas agar tidak timbulnya perselisihan yang berbeda pada masyarakat.

Operasionalisasi konsep adalah proses mendefinisikan variabel-variabel dalam penelitian sehingga dapat diukur dan diuji. Untuk penelitian dengan judul "Analisis Implementasi *Key Performance Indicators* (KPI) oleh Inspektorat Kendal dalam Rangka Mewujudkan *Good governance* dan Mengurangi Korupsi Kepala Desa," berikut adalah operasionalisasi dari konsep-konsep utama:

1.8.1 *Key Performance Indicators* (KPI)

1. **Definisi Konseptual:** Alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi atau individu terhadap tujuan yang telah ditetapkan.
2. **Definisi Operasional:**
 - a. **Jumlah KPI yang diterapkan:** Berapa banyak KPI yang digunakan oleh Inspektorat Kendal.
 - b. **Jenis KPI yang diterapkan:** Kategori dan spesifikasi KPI yang digunakan (misalnya, keuangan, kepatuhan, kualitas layanan).
 - c. **Frekuensi Pengukuran:** Seberapa sering KPI diukur dan dievaluasi.
 - d. **Pelaporan KPI:** Metode dan frekuensi pelaporan hasil KPI kepada pemangku kepentingan.

1.8.2 *Good governance*

1. **Definisi Konseptual:** Serangkaian prinsip yang mendasari pengelolaan sektor publik yang transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, berlandaskan hukum, dan inklusif.
2. **Definisi Operasional:**
 - a. **Transparansi:**
 - 1) **Indikator:** Ketersediaan informasi publik terkait keputusan dan kebijakan pemerintah desa.

- 2) **Pengukuran:** Jumlah dan jenis dokumen yang tersedia untuk publik, tingkat aksesibilitas informasi.

b. Akuntabilitas:

- 1) **Indikator:** Mekanisme pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintah desa.
- 2) **Pengukuran:** Jumlah laporan kinerja yang disusun dan disampaikan, adanya sistem feedback dari masyarakat.

c. Partisipasi:

- 1) **Indikator:** Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
- 2) **Pengukuran:** Jumlah pertemuan publik, survei partisipasi, tingkat kehadiran masyarakat.

d. Efektivitas dan Efisiensi:

- 1) **Indikator:** Tingkat pencapaian tujuan pemerintah desa dengan penggunaan sumber daya yang optimal.
- 2) **Pengukuran:** Perbandingan antara output dan input program desa, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.

1.8.3 Peran Inspektorat

1. **Definisi Konseptual:** Fungsi pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Inspektorat daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan peningkatan kinerja.

2. Definisi Operasional:

a. Pengawasan dan Audit:

- 1) **Indikator:** Jumlah dan jenis audit yang dilakukan, frekuensi audit.
- 2) **Pengukuran:** Jumlah laporan audit, temuan audit.

b. Penegakan Aturan dan Kebijakan:

- 1) **Indikator:** Prosedur penegakan aturan, jumlah sanksi yang diberikan.
- 2) **Pengukuran:** Jumlah pelanggaran yang ditindak, jenis

sanksi yang diterapkan.

c. Pencegahan dan Deteksi Korupsi:

- 1) **Indikator:** Program pencegahan korupsi, jumlah kasus korupsi yang terdeteksi.
- 2) **Pengukuran:** Jumlah program pencegahan yang diimplementasikan, jumlah kasus korupsi yang diungkap.

1.8.4 Korupsi di Tingkat Desa

1. **Definisi Konseptual:** Penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat desa untuk keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan publik.

2. Definisi Operasional:

a. Frekuensi Korupsi:

- 1) **Indikator:** Jumlah kasus korupsi yang terdeteksi dan dilaporkan.
- 2) **Pengukuran:** Data dari laporan inspektorat, jumlah kasus yang diproses hukum.

b. Jenis Korupsi:

- 1) **Indikator:** Kategori korupsi (misalnya, penggelapan dana, penyalahgunaan wewenang).
- 2) **Pengukuran:** Jenis dan jumlah setiap kategori kasus korupsi.

c. Dampak Korupsi:

- 1) **Indikator:** Dampak korupsi terhadap pembangunan desadan kesejahteraan masyarakat.
- 2) **Pengukuran:** Penilaian kualitatif dan kuantitatif dari program yang terhambat, kerugian finansial, tingkat kepuasan masyarakat.

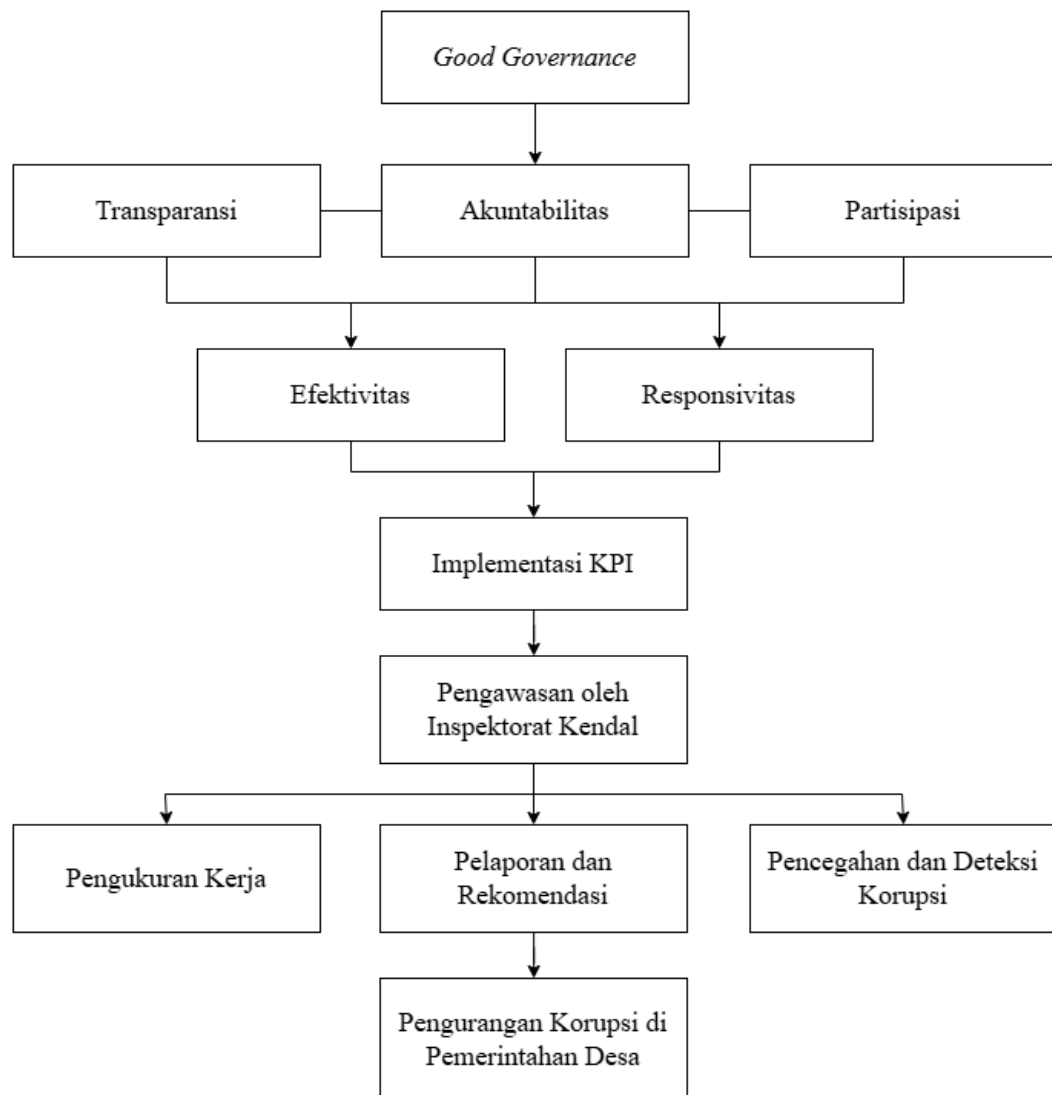
Tabel 1. 1 Operasional Konsep

Konsep	Indikator	Pengukuran
KPI	Jumlah KPI yang diterapkan	Data dari Inspektorat Kendal

	Jenis KPI yang Diterapkan	Kategori dan spesifikasi KPI
	Frekuensi Pengukuran	Jadwal pengukuran dan evaluasi
	Pelaporan KPI	Frekuensi dan metode pelaporan
<i>Good governance</i>	Transparansi	Jumlah dan jenis dokumen publik, aksesibilitas
	Akuntabilitas	Jumlah laporan kinerja, <i>system feedback</i>
	Partisipasi	Jumlah pertemuan publik, tingkat kehadiran masyarakat
	Efektivitas dan Efisiensi	Perbandingan output/input, tingkat kepuasan
Peran Inspektorat	Pengawasan dan Audit	Jumlah dan jenis audit, laporan audit
	Penegakan Aturan dan Kebijakan	Jumlah pelanggaran yang ditindak, jenis sanksi
	Pencegahan dan Deteksi Korupsi	Program pencegahan, jumlah kasus yang diungkap
Korupsi di Desa	Frekuensi Korupsi	Jumlah kasus terdeteksi, data laporan inspektorat
	Jenis Korupsi	Kategori dan jumlah setiap jenis kasus korupsi
	Dampak Korupsi	Kerugian finansial, penilaian dampak program

Dengan operasionalisasi ini, penelitian dapat mengukur secara konkret dan terstruktur bagaimana implementasi KPI oleh Inspektorat Kendal berkontribusi terhadap *good governance* dan upaya pengurangan korupsi di pemerintahan desa.

1.9 Kerangka Berpikir



Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir

1.10 Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk mencapai tujuan dan kegunaan tertentu. Cara dalam hal ini ialah dengan mendasar ciri ilmu yang bersifat secara rasional, empiris, dan sistematis. Dapat dikatakan rasional jika cara yang dilakukan adalah masuk akal, sehingga mudah di mengerti dan dipahami oleh orang lain. Empiris merupakan cara yang dilakukan dengan menggunakan panca indra, sehingga orang dapat melihat dan mengetahui dengan cara yang digunakan. Sistematis suatu proses yang dilakukan dalam penelitian dengan menggunakan berbagai langkah yang bersifat logis. Berdasarkan (Creswell, 2016). Dalam teknik metode penelitian ini dilakukan dengan macam-macam teknik

analisis yaitu dengan cara pengumpulan, serta data interpretasi dijelaskan dalam melakukan penelitiannya. Penelitian memiliki 3 metode yaitu kualitatif, kuantitatif, dan *mix methods* maksud dari *mix methods* ini ialah campuran antara kualitatif dan kuantitatif.

Penelitian memiliki tujuan dan kegunaan tertentu di setiap melaksanakan penelitian. Secara garis besar penelitian memiliki 3 macam, dapat dijelaskan seperti berikut; bersifat penemuan, menunjukan pembuktian, serta pembuktian dan pembangunan. Penemuan merupakan temuan data yang diperoleh masih benar-benar baru ditemukan dan belum pernah di temui oleh peneliti lain. Sedangkan, pembuktian merupakan perolehan data digunakan dalam membuktikan adanya ketidak yakinan dalam mendoatkan informasi. Pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang sudah ada. Tipe penelitian deskriptif ini adalah teknik analisa yang memberikan informasi hanya mengenai data yang diamati dan tidak bertujuan untuk menguji hipotesis serta menarik kesimpulan yang digeneralisasikan terhadap populasi. Tujuannya untuk menyajikan data agar bermakna dan komunikatif.

1.10.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian "Analisis Implementasi Key Performance Indicators (KPI) oleh Inspektorat Kendal dalam Rangka Mewujudkan *Good governance* dan Mengurangi Korupsi Kepala Desa," digunakan pendekatan **deskriptif kualitatif** dan **kuantitatif**. Berikut adalah penjelasan rinci tentang jenis penelitian ini:

1. Pendekatan Deskriptif Kualitatif

Deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara rinci dan mendalam. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk:

- a. Menggambarkan Implementasi KPI: Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana KPI diimplementasikan oleh Inspektorat Kendal, mencakup proses, tantangan, dan strategi yang digunakan.
- b. Mengidentifikasi Pengaruh KPI terhadap *Good governance*:

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana penerapan KPI berkontribusi terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

- c. Mengevaluasi Upaya Pengurangan Korupsi: Penelitian ini akan menilai sejauh mana implementasi KPI oleh Inspektorat Kendal berhasil dalam mengurangi korupsi di tingkat desa.

Teknik Pengumpulan Data Kualitatif:

- a. Wawancara: Melibatkan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat Inspektorat, kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat.
- b. Observasi: Melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan di Inspektorat dan desa-desa yang menjadi objek penelitian.
- c. Dokumentasi: Mengkaji dokumen resmi seperti laporan audit, laporan kinerja, dan regulasi terkait.

Analisis Data Kualitatif:

- a. Analisis Tematik: Mengidentifikasi tema-tema utama dari transkrip wawancara dan catatan observasi untuk memahami pola dan hubungan dalam data.

2. Pendekatan Kuantitatif

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur dan menganalisis data numerik terkait dengan implementasi KPI dan dampaknya terhadap korupsi di desa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan statistik antara variabel-variabel yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif:

- a. Kuesioner: Menggunakan pertanyaan tertutup untuk mengumpulkan data dari sampel yang lebih luas mengenai persepsi dan pengalaman terkait implementasi KPI dan tingkat korupsi di desa.

Analisis Data Kuantitatif:

- a. Statistik Deskriptif: Menggunakan metode seperti penghitungan frekuensi, persentase, rata-rata, dan standar deviasi untuk mendeskripsikan data kuantitatif.
- b. Analisis Korelasi: Menilai hubungan antara implementasi KPI dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan tingkat korupsi.

Alasan Memilih Pendekatan Kombinasi

Menggunakan pendekatan kombinasi deskriptif kualitatif dan kuantitatif memberikan beberapa keuntungan:

- a. Kedalaman dan Keterwakilan: Pendekatan kualitatif memberikan kedalaman informasi melalui wawancara mendalam dan observasi, sementara pendekatan kuantitatif memberikan keterwakilan melalui data yang dapat digeneralisasi.
- b. Triangulasi Data: Menggunakan berbagai sumber data dan metode pengumpulan data membantu memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.
- c. Komprehensivitas: Pendekatan kombinasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang fenomena yang diteliti, mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif.

Dengan menggabungkan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam serta bukti empiris yang kuat mengenai implementasi KPI oleh Inspektorat Kendal dalam upaya mewujudkan *good governance* dan mengurangi korupsi di tingkat desa.

1.10.2 Situs Penelitian

Tempat atau wilayah yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu Kawasan Inspektorat Kabupaten Kendal.

1.10.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul "Analisis Implementasi *Key Performance Indicators* (KPI) oleh Inspektorat Kendal dalam Rangka

Mewujudkan *Good governance* dan Mengurangi Korupsi Kepala Desa," subjek penelitian terdiri dari beberapa kelompok kunci yang memiliki peran signifikan dalam implementasi KPI dan pengawasan terhadap korupsi di tingkat desa. Pejabat dan staf Inspektorat Kendal, termasuk kepala inspektorat, auditor, dan staf administratif, menjadi subjek utama karena mereka bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi KPI. Mereka akan memberikan informasi yang penting tentang bagaimana KPI diimplementasikan dan dievaluasi, serta kendala dan keberhasilan yang dihadapi dalam proses tersebut.

Selain itu, kepala desa yang memimpin pemerintahan desa di Kabupaten Kendal juga menjadi subjek penelitian. Peran mereka dalam pengelolaan keuangan dan administrasi desa sangat penting untuk menilai dampak KPI terhadap tata kelola desa dan upaya pengurangan korupsi. Informasi dari kepala desa akan memberikan gambaran tentang efektivitas KPI dalam meningkatkan *good governance* di desa. Perangkat desa, termasuk sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala dusun, juga dipilih sebagai subjek penelitian karena keterlibatan langsung mereka dalam operasional pemerintahan desa dan pelaksanaan kebijakan yang dipantau oleh KPI. Mereka dapat memberikan rincian mengenai implementasi kebijakan, pengawasan internal, dan tantangan yang dihadapi.

Masyarakat desa, sebagai penerima manfaat dari kebijakan dan program pemerintah desa, juga menjadi subjek penelitian. Persepsi dan pengalaman mereka penting untuk menilai efektivitas KPI dalam mewujudkan *good governance*. Masyarakat dapat memberikan umpan balik mengenai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kualitas layanan publik di desa. Selain itu, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk aktivis anti-korupsi dan perwakilan organisasi masyarakat sipil, dipilih sebagai subjek penelitian untuk memberikan perspektif yang lebih luas tentang dampak implementasi KPI terhadap *good governance* dan upaya pengurangan korupsi di tingkat desa. Dengan subjek penelitian yang beragam dan relevan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang

komprehensif mengenai implementasi KPI oleh Inspektorat Kendal.

1.10.4 Sampel

Sampel penelitian adalah subset dari populasi yang dipilih untuk berpartisipasi dalam penelitian. Dalam penelitian "Analisis Implementasi *Key Performance Indicators* (KPI) oleh Inspektorat Kendal dalam Rangka Mewujudkan *Good governance* dan Mengurangi Korupsi Kepala Desa," sampel dipilih untuk memastikan representativitas dan relevansi dalam menjawab pertanyaan penelitian. Berikut adalah deskripsi rinci mengenai sampel yang akan digunakan:

Tabel 1. 2 Sampel Penelitian

KelompokSubjek	Jumlah Sampel	Kriteria Pemilihan	Teknik Pemilihan
Pejabat/Staf Inspektorat Kendal	1 Orang	a. Memiliki jabatan strategis terkait implementasi KPI	<i>Purposive Sampling</i>
Kepala Desa	1 orang	a. Kepala desa dari berbagai desa di Kabupaten Kendal b. Desa dengan karakteristik berbeda (ukuran, Tingkat kerawanan korupsi, partisipasi dalam program inspektorat	<i>Purposive Sampling</i>

Penjelasan Tabel:

1. Pejabat atau Staf Inspektorat Kendal:
 - a. Jumlah Sampel: 1 orang.
 - b. Kriteria Pemilihan: Mereka yang memiliki jabatan strategis terkait implementasi KPI dan terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi KPI.
 - c. Teknik Pemilihan: *Purposive Sampling*, yang dipilih secara sengaja berdasarkan relevansi dan pengalaman.

2. Kepala Desa:

- a. Jumlah Sampel: 1 orang.
- b. Kriteria Pemilihan: Kepala desa dari berbagai desa di Kabupaten Kendal.
- c. Teknik Pemilihan: Purposive Sampling, untuk memastikan variasi karakteristik desa.

1.10.5 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya melalui teknik seperti wawancara mendalam, kuesioner, dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan pejabat dan staf Inspektorat Kendal, kepala desa, perangkat desa, masyarakat desa, serta tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai implementasi KPI, tantangan yang dihadapi, serta persepsi dan pengalaman mereka tentang *good governance* dan upaya pengurangan korupsi. Kuesioner disebarikan kepada sampel yang lebih luas untuk mengumpulkan data kuantitatif terkait persepsi dan pengalaman mereka tentang penerapan KPI dan dampaknya terhadap *good governance* dan korupsi di tingkat desa. Observasi langsung dilakukan untuk mendapatkan data observasional yang mendukung temuan dari wawancara dan kuesioner.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Inspektorat Kendal seperti laporan audit, laporan kinerja, dan dokumen lainnya untuk memahami implementasi dan evaluasi KPI serta efektivitas pengawasan yang dilakukan. Laporan keuangan dan administrasi desa dianalisis untuk mendapatkan gambaran tentang pengelolaan keuangan desa

dan mengidentifikasi potensi korupsi. Regulasi dan kebijakan terkait dikaji untuk memahami kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur implementasi KPI, *good governance*, dan pemberantasan korupsi. Selain itu, literatur, artikel jurnal, dan penelitian sebelumnya yang relevan ditinjau untuk mendapatkan wawasan tentang temuan penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai dasar teoretis dan pembanding.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan informasi yang kaya dan mendetail dari para informan kunci. Teknik ini melibatkan percakapan tatap muka antara peneliti dan informan untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan pandangan mereka terkait implementasi KPI dan upaya pengurangan korupsi. Informan kunci dalam penelitian ini mencakup pejabat dan staf Inspektorat Kendal, seperti kepala inspektorat, auditor senior, dan staf yang terlibat dalam implementasi KPI, serta kepala desa dan perangkat desa, termasuk sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala dusun. Selain itu, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, seperti aktivis anti-korupsi dan perwakilan organisasi masyarakat sipil, juga diwawancarai untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai tantangan dan keberhasilan dalam mewujudkan *good governance* di tingkat desa.

2. Kuesioner

Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari sampel yang lebih luas. Kuesioner dirancang dengan pertanyaan tertutup dan terbuka untuk mendapatkan data yang relevan mengenai persepsi dan pengalaman terkait KPI dan *good governance*. Teknik ini melibatkan penyebaran kuesioner kepada kepala desa dan perangkat desa untuk mengumpulkan data

tentang penerapan KPI dan dampaknya terhadap tata kelola desa. Selain itu, masyarakat desa juga menjadi responden kuesioner untuk mendapatkan pandangan mereka tentang transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik di desa. Penggunaan kuesioner memungkinkan penelitian ini mendapatkan data yang lebih representatif dan mampu melakukan generalisasi temuan ke populasi yang lebih luas.

3. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati langsung proses dan kegiatan terkait implementasi KPI di Inspektorat Kendal serta aktivitas pemerintahan desa. Teknik ini melibatkan pengamatan terhadap pelaksanaan KPI, seperti rapat, pelatihan, dan aktivitas monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Kendal. Selain itu, observasi juga dilakukan terhadap aktivitas pemerintahan desa, termasuk pengelolaan administrasi dan keuangan desa serta interaksi antara perangkat desa dan masyarakat. Observasi memberikan data observasional yang nyata dan langsung, yang dapat mendukung dan memperkuat temuan dari wawancara dan kuesioner. Dengan mengamati langsung, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih akurat dan kontekstual mengenai implementasi KPI dan tantangan yang dihadapi di lapangan.

4. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai dokumen dan laporan yang relevan. Data sekunder yang dikumpulkan mencakup dokumen resmi Inspektorat Kendal, seperti laporan audit, laporan kinerja, dan dokumen lainnya yang dihasilkan oleh Inspektorat Kendal. Selain itu, laporan keuangan dan administrasi desa dari desa-desa yang menjadi sampel penelitian juga dianalisis untuk mendapatkan gambaran tentang pengelolaan keuangan desa dan

mengidentifikasi potensi korupsi. Regulasi dan kebijakan terkait, seperti peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, dikaji untuk memahami kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur implementasi KPI dan *good governance*. Studi dan penelitian terdahulu yang relevan juga ditinjau untuk mendapatkan wawasan tentang temuan sebelumnya yang dapat digunakan sebagai dasar teoretis dan pembanding. Dokumentasi menyediakan data sekunder yang memberikan konteks dan latar belakang yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut, sehingga memperkaya dan memperkuat temuan penelitian ini.